

**TINJAUAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN
PEMBUANGAN LIMBAH YANG BERDAMPAK TERCEMARNYA
DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DALAM MENERBITKAN IZIN PEMBUANGAN
LIMBAH CAIR (IPLC) MUNURUT HUKUM INDONESIA**

Youhana Nurjenias S.P

(1487061)

ABSTRAK

Penerbitan izin yang dilakukan pemerintah adalah suatu kebijakan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Faktanya masih terdapat beberapa perusahaan yang mempunyai izin namun sudah tidak berlaku lagi bahkan ada perusahaan yang tidak mempunyai izin pembuangan limbah. Dampak yang ditimbulkan adalah rusaknya lingkungan sehingga menurunkan nilai estetika lingkungan atau menurunnya kualitas air. Tidak ada lembaga lain diluar pemerintah yang bisa memberikan izin pengelolaan lingkungan hidup.

Metode penelitian yang digunakan adalah adalah yuridis normatif yang memiliki sumber penelitiannya adalah data kepustakaan. Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif analitik yang menggambarkan sesuatu dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian skripsi ini adalah bahwa didalam Undang-Undang No. 37 tahun 2012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai, undang-undang tersebut mendukung undang-undang nomor 32 tahun 2009 pasal 1 yaitu tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dalam penerbitan izin oleh pemerintah untuk perusahaan yang melakukan pembuangan limbah. Dengan adanya undang-undang ini perusahaan masih saja tidak mentaati semua ketentuan yang sudah tercantum didalam peraturannya, padahal sudah sangat jelas diatur muatannya didalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang No. 37 tahun 2012 tentang pengelolaan daerah aliran sungai dan undang-undang nomor 32 tahun 2009 yaitu tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berjalan secara beriringan. Namun, ketika ada permasalahan yang spesifik mengenai pembuangan limbah dan penerbitan izin maka peraturan yang diberlakukan adalah undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup konteks fungsi hukum pidana sebagai ultimum remidium karena pengelolaan lingkungan mempunyai karakter administratif, khususnya yang menyangkut penggunaan wewenang pemerintah di bidang perizinan.

Kata kunci: pembuangan limbah cair, perusahaan, penerbitan izin.

**A REVIEW OF A COMPANY THAT DOES THE DISPOSAL OF
SEWAGE WHICH HAS THE EFFECT OF THE CONTAMINATION OF
RIVER BASIN AREAS AND RESPONSIBILITY OF THE GOVERNMENT
IN ISSUING THE PERMIT THE DISPOSAL OF SEWAGE A LIQUID
UNDER INDONESIAN LAW**

Youhana Nurjenias S.P
(1487061)

ABSTRACT

The issuance of permits made by the government is a policy in carrying out environmental protection and management to preserve the environment for the interests of present and future generations. The fact is that there are still some companies that have permits but are no longer valid even there are companies that do not have waste disposal licenses. The impact is damage to the environment thereby reducing the aesthetic value of the environment or decreasing water quality. There are no other institutions outside the government that can give environmental management permits

The research method used is normative juridical which has the source of research is library data. The research conducted is descriptive analytic which describes something with words or sentences, then the categories are separated to get conclusions. The approach taken is the law approach and conceptual approach. The results of this thesis research are that in Law No. 37 of 2012 concerning watershed management, the law supports law number 32 of 2009 article 1 namely concerning Environmental Protection and Management (PPLH) in the issuance of permits by the government for companies that carry out waste disposal. With the existence of this law, the company still does not comply with all provisions contained in the regulations, even though it has been clearly regulated in the environmental protection and management law.

Law No. 37 of 2012 concerning watershed management and law number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (PPLH) runs independently. However, when there are specific issues regarding waste disposal and permit issuance, the applicable regulation is law number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management the context of the function of criminal law as ultimum remidium because environmental management has an administrative character, especially concerning the use of government authority in the field of licensing.

Keywords: the disposal of sewage liquid, the company, of license publishing.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI TUGAS AKHIR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PELAKU USAHA TERHADAP LINGKUNGAN	
A. Pelaku Usaha Terhadap Lingkungan	19
B. Lingkungan Hidup	27

	C. Asas-Asas Mengenai Pelaku Usaha Dan Lingkungan Hidup	30
BAB III	TINJAUAN ATURAN TERKAIT PENERBITAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC)	
	A. Peraturan Terkait Penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair.	37
	B. Grafis Sumber Pencemaran Limbah	45
	C. Baku Mutu Limbah Cair	46
	D. Table Nilai pH.....	50
BAB IV	ANALISIS MENGENAI TINJAUAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PEMBUANGAN LIMBAH YANG BERDAMPAK TERCEMARNYA DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENERBITKAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR (IPLC) MENURUT HUKUM INDONESIA.	

A.	Analisis Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pembuangan Limbah Cair Yang Berdampak Tercemarnya Daerah Aliran Sungai	55
1.	Tinjauan Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pembuangan Limbah Cair	55
2.	Pembuangan Limbah Yang Menyebabkan Tercemarnya Daerah Aliran Sungai (DAS).....	63
3.	Langkah-Langkah Yang Bias Dilakukan Oleh Masyarakat Sekitar Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pembuangan Limbah.....	65
B.	Analisis Terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menerbitkan Izin Limbah Cair Menurut Hukum Indonesia.....	73
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
A.	SIMPULAN	79
B.	SARAN	82
	DAFTAR PUSTAKA	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	